



RENCANA STRATEGIS 2023-2026



DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta ini disusun berdasarkan isu-isu strategis urusan penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang, jasa konstruksi dan pertanahan yang menjadi tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana urusan.

Rencana Strategis ini disusun selaras dan bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta regulasi dan kebijakan urusan DCKTRP. Selain itu, Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan dalam Rencana Strategis ini juga disusun berdasarkan gambaran pelayanan, evaluasi capaian indikator kinerja, serta pencapaian dan persoalan penyelenggaraan urusan DCKTRP pada rentang periode pelaksanaan perencanaan sebelumnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DCKTRP Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Renstra yang sudah tersusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang akan disusun menjadi Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan juga sebagai acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja SKPD hingga tahun akhir perencanaan,

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini, terutama kepada seluruh pegawai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkoordinasi dengan baik dan berkontribusi secara proporsional baik langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh rangkaian penyusunan Rencana Strategis ini dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 17 Juni 2022

Kepala Dinas

Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta


Heru Hermawanto
NIP. 196803121998031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
I. Pendahuluan	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	21
3.1. Identifikasi Permasalahan	21
3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.....	22
3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.....	24
3.4. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	28
3.5. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	29
3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	29
3.7. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>).....	30
3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
IV. Tujuan dan Sasaran	34
V. Strategi dan Arah Kebijakan	36
VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	40
VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	80
VIII. Penutup	83

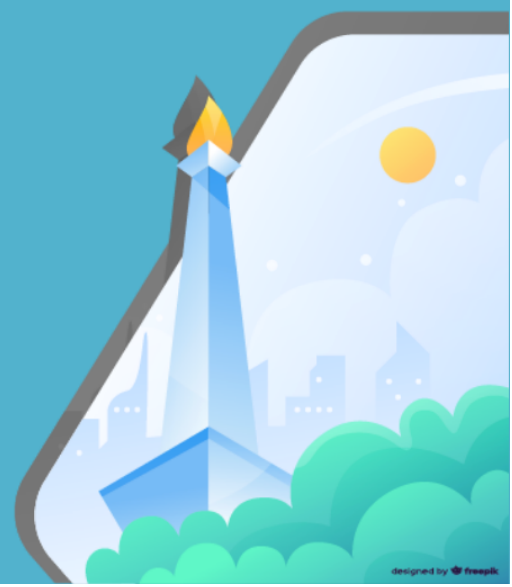
DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Diagram Keterkaitan Dokumen Perencanaan	3
Gambar II-1 Struktur Organisasi DCKTRP DKI Jakarta	15

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Tugas dan Fungsi Perangkat DCKTRP DKI Jakarta	9
Tabel II-2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	18
Tabel II-3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DCKTRP Provinsi DKI Jakarta	19
Tabel III-1	Tabel Identifikasi Permasalahan Urusan DCKTRP DKI Jakarta	21
Tabel III-2	Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	24
Tabel III-3	Tujuan dan Sasaran terkait Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023 2026	25
Tabel III-4	Strategi Pembangunan terkait Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023 2026.....	27
Tabel IV-1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023 2026	34
Tabel V-1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
Tabel VI-1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	43
Tabel VII-1	Indikator Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026 Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	80
Tabel VII-2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah 2023-2026 Yang Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD	80

BAB I PENDAHULUAN



I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki sejarah yang panjang dan menjalani proses pengembangan dan pembangunan kota yang cukup kompleks sejak masa kolonial hingga saat ini. Peran Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara telah sangat menentukan bagi arah berjalannya pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak hanya pada lingkup lokal dan nasional, pada lingkup regional dan internasional pun DKI Jakarta turut memainkan peran yang sangat penting. Perhatian terhadap Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga dari negara-negara lain.

Berkaca sebagai kota metropolitan pertama di negeri ini, Provinsi DKI Jakarta telah menjadi acuan utama bagi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Sebagai bagian dari salah satu kota besar di Asia, bahkan dunia, Provinsi DKI Jakarta yang meruakan pusat pemerintahan, juga menjadi pintu gerbang bagi negara-negara lain yang memiliki kepentingan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Perkembangan Provinsi DKI Jakarta yang demikian pesat ini juga berdampak pada semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah, khususnya di tingkat provinsi. Mulai dari maslaah yang diakibatkan oleh tingkat urbanisasi yang sangat tinggi, bencana banjir tahunan, kemacetan, polusi, dan permasalahan perkotaan lainnya. Adapun salah satu solusi yang dicanangkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan mengarahkan pembangunan dan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta menuju Kota Berkelanjutan, dimana berbagai konsep pendukung dapat diimplementasikan demi pembangunan kota ke arah yang lebih berkelanjutan dan humanis, diantaranya adalah melalui menstandarisasikan bangunan-bangunan yang ada agar bersertifikasi hijau, mengintensifikasikan penggunaan kawasan, menambah ruang-ruang terbuka hijau publik, serta mempromosikan penggunaan moda transportasi yang bersifat berkelanjutan.

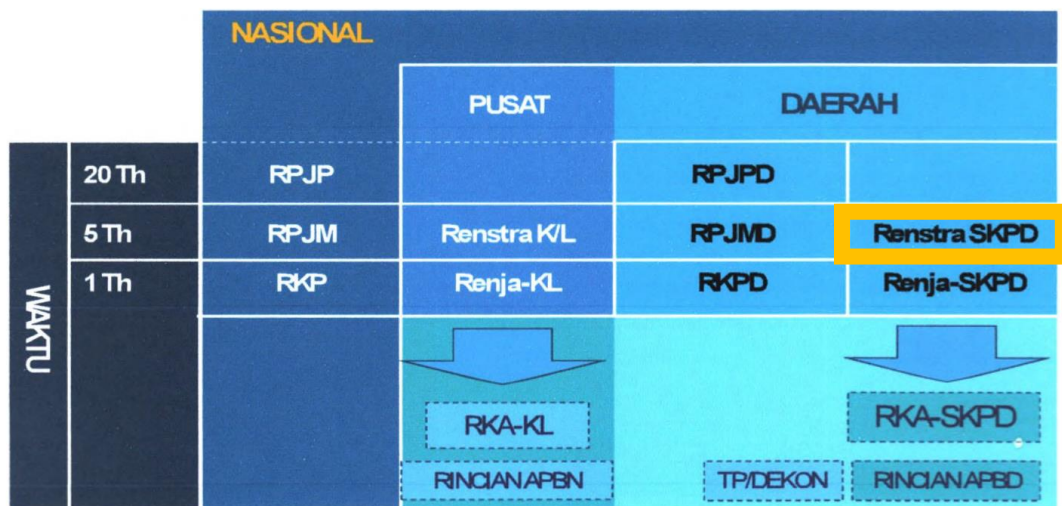
Demi menuju Provinsi DKI Jakarta yang lebih berkelanjutan, tentunya dibutuhkan rencana pembangunan yang matang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 telah memasuki tahun terakhir perencanaan 2022 seiring dengan pergantian kepala daerah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan harus segera disusun sebagaimana diinstruksikan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021.

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertahanan yang dijabarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja dengan Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016.

Untuk dapat melaksanakan urusan dan mengarahkan kinerja pelayanan SKPD khususnya dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta memerlukan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) tingkat SKPD yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen perencanaan ini akan sangat membantu dalam upaya mengarahkan pengembangan

pelaksanaan SKPD dan target yang hendak dicapai, cara pencapaian, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan terkait, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, Rencana Strategis ini tentunya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dapat diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar I-1 Diagram Keterkaitan Dokumen Perencanaan

(Sumber: Panduan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2012)

1.2. LANDASAN HUKUM

Dokumen Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan beberapa dasar hukum terkait perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 juga mengacu pada beberapa kebijakan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Berikut adalah dasar hukum penyusunan rencana strategis ini:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; dan
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026 ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah Kebijakan dan merumuskan program kegiatan yang sudah disesuaikan dengan program nasional bidang penataan ruang dan pertanahan sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah terwujudnya pembangunan di bidang penataan ruang dan pertanahan di Provinsi DKI Jakarta yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 - 2026 ini adalah:

1. Sebagai acuan bagi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan pertanahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis ini terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berisikan pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Berisikan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berisikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Berisikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan

Berisikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Berisikan tinjauan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta 2023-2026 yang berkaitan dengan urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga

Berisikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian PUPR khususnya pada bidang Bina Konstruksi dan Cipta Karya.

3.4. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah

Berisikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka panjang dan menengah dalam pembangunan DKI Jakarta.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berisikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi dalam perencanaan penataan ruang DKI Jakarta.

3.6. Penentuan Isu Strategis

Berisikan isu strategis dalam lingkup urusan bidang-bidang di bawah naungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan

Berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH



II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang bangunan gedung, sub urusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan bidang penataan ruang, sub urusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan memiliki tugas untuk melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- c. pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
- d. perencanaan rencana rinci tata ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi rencana rinci tata ruang;
- f. perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah daerah;
- g. penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
- h. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;
- i. pemetaan ruang kota;
- j. penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung;
- k. perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- l. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
- m. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- o. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan

- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Struktur organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 279 tahun 2016 berikut Tugas dan Fungsi dari masing-masing perangkatnya adalah sebagai berikut:

Tabel II-1 Tugas dan Fungsi Perangkat DCKTRP DKI Jakarta

Jabatan	Tugas Pokok/ Fungsi
Kepala Dinas	Tugas: a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional; c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
Sekretariat	Tugas: Administrasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Fungsi: a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat; b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat; c. Pengekoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; d. Penyusunan Kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sekretariat; e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Oleh Unit Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; f. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis urusan tata ruang dan pengawasan bangunan g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan h. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; i. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; j. Penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; k. Pengelolaan Kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; l. Pengekoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat
Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang kota	Tugas: Melaksanakan penyusunan perencanaan dan Evaluasi rencana tata ruang dan pengkajian dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kota. Fungsi: a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota; c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan , pengendalian pemanfaatan dan evaluasi rencana tata ruang; d. penyusunan dan evaluasi rencana riner tata ruang dan peraturan zonasi; e. Penyusunan dan evaluasi rencana induk kawasan tertentu; f. Pengkajian penatan kegiatan dalam pemanfaatan ruang;

Jabatan	Tugas Pokok/ Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> g. Pengkajian penerapan teknik pengaturan zonasi, rencana pemanfaatan ruang dan pemberian insentif dan disinsentif; h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola ruang; i. Penyusunan tanggapan terhadap keberatan masyarakat atas penerapan rencana tata ruang; j. Pengusulan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai lingkup tugasnya; dan k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota.
Bidang Pertanahan dan Pemetaan	<p>Tugas: Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dasar; penyusunan peta dasar dan peta tematik, serta menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan perencanaan pertanahan.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pertanahan dan Pemetaan; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pertanahan dan Pemetaan; c. penyiapan perumusan kebijakan teknik pengukuran, pemetaan dan perencanaan pertanahan; d. perencanaan dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar, pengukuran topografi lahan, pengukuran batas wilayah administrasi, dan pengukuran kelautan; e. perencanaan dan penyusunan bahan penetapan titik patok koordinat geografi acuan pemetaan; f. pelaksanaan pematokan, pemantauan dan pemeliharaan patok titik koordinat geografi acuan pemetaan; g. pembuatan dan pengelolaan peta dasar dan peta tematik; h. pemutakhiran peta dasar secara berkala; i. pembuatan peta lokasi penetapan rencana kota; j. pelaksanaan penerapan rencana kota; k. penyusunan rencana umum ketersediaan lahan; l. pengumpulan dan penyajian data dan informasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan; m. penyusunan neraca penatagunaan lahan terkait penataan ruang kota; n. pelaksanaan koordinasi terkait pertanahan; o. penelitian dokumen pertanahan; p. pembinaan dan pemberdayaan kinerja tenaga fungsional pemetaan, pengukuran, dan pertanahan; dan q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pertanahan dan Pemetaan.
Bidang Pengawasan Bangunan	<p>Tugas: Melaksanakan pengawasan bangunan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengawasan Bangunan; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan Bangunan; c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengawasan bangunan; d. pengawasan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan; e. pembinaan pelaksanaan patroli ruang dan bangunan; f. penyusunan konsep pertimbangan teknis rencana teknis bongkar/demolisi; g. penelitian teknis pengawasan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan; h. pengusulan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung; dan i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Bangunan.

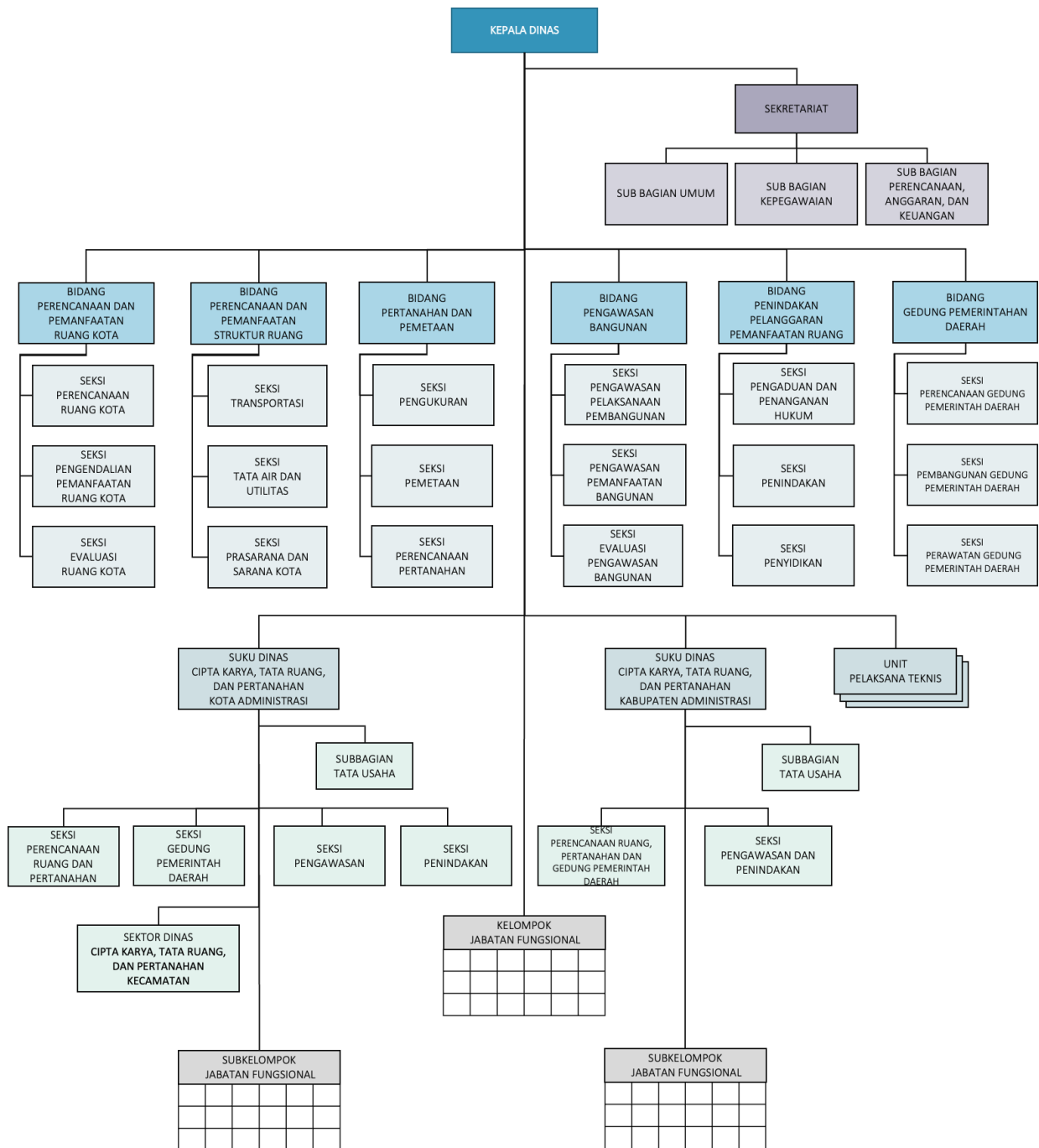
Jabatan	Tugas Pokok/ Fungsi
Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	<p>Tugas: Melaksanakan penindakan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung, serta pengelolaan pengaduan dan penanganan hukum.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang; c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penindakan dan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung serta pengelolaan pengaduan dan penanganan hukum; d. pengelolaan pengaduandan keberatan masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan lingkup tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruangdan Pertanahan; e. pendampingan dalam pelaksanaan penanganan hukum; f. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; g. pelaksanaan monitoring lapangan pelanggaran pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan gedung; h. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk pengenaan tindakan penertiban berupa bongkar paksa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; i. pembinaan dan monitoring kinerja fungsi penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung di Cabang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tingkat Kota, Kabupaten dan Kecamatan; j. penyusunan bahan rekomendasi pencabutan izin dan penurunan golongan IPTB kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); k. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penindakan dan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; dan m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Bidang Gedung Pemerintah Daerah	<p>Tugas: melaksanakan perencanaan dan pengawasan pembangunan baru dan perawatan/pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Gedung Pemerintah Daerah; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Gedung Pemerintah Daerah; c. penyusunan kebijakan pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan dan pengawasan bangunan gedung pemerintah daerah; d. pelaksanaan monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah; e. pelaksanaan bimbingan teknis pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah; f. perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah sesuai lingkup tugas Dinas; g. pengawasan perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengawasan, pembangunan serta perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah; i. pemberian pertimbangan teknis perencanaan dan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah; j. pemberian persetujuan teknis pembangunan gedung pemerintah daerah; k. pembinaan teknis terhadap penyedia jasa konstruksi bangunan gedung; dan

Jabatan	Tugas Pokok/ Fungsi
	<p>l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.</p>
Suku Dinas Kota	<p>Tugas: Melaksanakan Urusan penataan ruang, pertanahan, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kota Administrasi</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota; c. penyusunan bahan evaluasi tata ruang; d. penyusunan bahan dalam rangka pembuatan neraca penatagunaan lahan dan rencana umum ketersediaan lahan; e. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban izin pemanfaatan ruang sesuai dengan lingkup tugas Suku Dinas Kota; f. pelaksanaan pematokan, pemantauan dan pemeliharaan patok titik koordinat geografi acuan pemetaan; g. pelaksanaan pengukuran dan pematokan dalam rangka penerapan rencana kota sesuai dengan lingkup tugas Suku Dinas Kota; h. pembuatan peta tematik sesuai dengan lingkup tugas Suku Dinas Kota; i. pelaksanaan inventarisasi tanah terlantar; j. pengawasan dan pengkajian teknis pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota; k. penilaian teknis terhadap dokumen perencanaan bangunan gedung pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota; l. pelaksanaan monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta evaluasi perencanaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota; m. pengawasan perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota; n. pemberian pertimbangan teknis rencana teknis bongkar / domisili yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota; o. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; p. pelaksanaan monitoring lapangan pelanggaran pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan gedung; q. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk pengenaan tindakan penertiban berupa bongkar paksa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; r. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; s. pengelolaan pengaduan atas tindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung sesuai lingkup tugas Suku Dinas Kota; t. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku pembangunan dan masyarakat sesuai lingkup tugas Suku Dinas Kota; u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota; v. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota; w. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota; dan x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.
Suku Dinas Kabupaten	<p>Tugas: Melaksanakan Urusan penataan ruang, pertanahan, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan pada lingkup wilayah kabupaten.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Kabupaten; c. penyusunan bahan masukan dalam rangka evaluasi pola dan struktur ruang kota; d. penyusunan bahan masukan dalam rangka pembuatan neraca penatagunaan lahan dan rencana umum ketersediaan lahan; e. pelaksanaan inventarisasi tanah terlantar; f. pelaksanaan pematokan, pemantauan dan pemeliharaan patok titik koordinat geografi acuan pemetaan;

Jabatan	Tugas Pokok/ Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> g. pelaksanaan pengukuran dan pematokan dalam rangka penerapan rencana kota sesuai dengan lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten; h. pengawasan dan penelitian teknis pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten; i. pengawasan perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan gedung pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten; j. pemberian pertimbangan teknis rencana teknis bongkar/domisili; k. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran pelanggaran bangunan gedung; l. pelaksanaan monitoring lapangan pelanggaran pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan gedung; m. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengenaan tindakan penertiban berupa bongkar paksa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; n. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung; o. pengelolaan pengaduan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung sesuai Kabupaten; p. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku pembangunan dan masyarakat sesuai lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten; q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kabupaten; r. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtangga Suku Dinas Kabupaten; s. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten; t. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten; u. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten; dan v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.
Pusat Data dan Informasi	<p>Tugas: Melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pengembangan dan pengolahan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan; c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; d. pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, analisa, penyediaan, dan penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan; e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang komunikasi, inform atika dan statistik; f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan; g. pengelolaan perangkat infrastruktur dan sistem keamanan infrastruktur teknologi informasi; h. pengelolaan data digital dan geospatial cipta karya, tata ruang dan pertanahan; i. pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan; j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; m. Pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; n. Pelaksanaan publiksi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Jabatan	Tugas Pokok/ Fungsi
Unit Pengadaan Tanah	<p>Tugas: Melaksanakan Pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta pelaksanaan pengadaan tanah yang diusulkan oleh PD/UPD selain yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. penyusunan norma, standar, dan prosedur, Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; d. pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah bagi prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; e. pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan baik yang dibiayai Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah/swasta lainnya; f. pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum sehubungan dengan pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; h. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, musyawarah dan pemberian ganti rugi; i. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil pengadaan tanah pada PD/UPD selain yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; j. pelaksanaan pengadaan tanah dalam satu lokasi yang berbeda zonasi dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; m. pengelolaan kearsipan data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; n. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Gambar II-1 Struktur Organisasi DCKTRP DKI Jakarta

2.2. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan Renstra DCKTRP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Renstra periode Tahun 2018-2022, digambarkan melalui pencapaian kinerja serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah. Tabel II-2 menjabarkan pencapaian Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022. Terdapat 2 indikator kinerja tujuan/sasaran dengan tingkat pencapaian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
Capaian kinerja indikator persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana terus mengalami penurunan dengan rasio capaian di atas 100% dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021, persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana mencapai angka 28,01% melebihi target kinerja sebesar 39%. Rata-rata rasio capaian indikator tersebut pada tahun 2018 hingga 2021 sebesar 129,53%.
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar
Capaian kinerja indikator persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dengan rasio capaian di atas 100%. Pada tahun 2021, persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar mencapai angka 58,76% melebihi target kinerja sebesar 58%. Rata-rata rasio capaian indikator tersebut pada tahun 2018 hingga 2021 sebesar 104,6%.

Pada level indikator kinerja program, yang juga menjadi indikator kinerja utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 terdapat 7 (tujuh) indikator. Berikut adalah uraian capaian indikator tersebut :

- 1) Rasio kesesuaian rencana tata ruang
Pada tahun 2021, rasio kesesuaian rencana tata ruang mencapai angka 71,99%, dan 71,62% pada tahun 2020 dimana capaian ini melebihi target kinerja yaitu sebesar 60%. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021, capaian rasio kesesuaian rencana tata ruang melebihi angka 100% dengan rata-rata sebesar 115,37%.
- 2) Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani
Pada tahun 2021, persentase pelanggaran tata ruang mencapai angka 99,22%, dan 94,63% pada tahun 2020. Capaian ini melebihi target kinerja yaitu sebesar 90%. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021, capaian persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani melebihi angka 100% dengan rata-rata sebesar 105,61%.
- 3) Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar
pada tahun 2021 mencapai angka 58,76% dan 58,65% pada tahun 2020. Capaian tersebut telah melebihi target kinerja yaitu sebesar 56%. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021, capaian persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar melebihi angka 100% dengan rata-rata sebesar 103,42%.
- 4) Persentase penyelesaian administrasi pertanahan

Persentase penyelesaian administrasi pertanahan memiliki target kinerja hanya untuk tahun 2018 yaitu sebesar 73,26%. Pada tahun 2018, capaian kinerja indikator tersebut ialah sebesar 78,20% dengan rasio capaian sebesar 106,74%.

- 5) Jumlah bidang tanah yang sudah terdata
Pada tahun 2019 terdapat 1.492.752 jumlah bidang tanah yang sudah terdata. Jumlah ini telah melebihi target kinerja dengan rasio capaian 132,37% dari target di tahun 2019 sebanyak 1.127.736 bidang tanah.
- 6) Indeks kepuasan pelayanan kantor
Indeks kepuasan pelayanan kantor pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2021 mencapai angka 4 dan telah sesuai dengan target. Nilai ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 yang mencapai nilai 3. Rata-rata rasio pencapaian indeks kepuasan pelayanan kantor dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ialah sebesar 93,75%.
- 7) Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Pada tahun 2018 dan tahun 2019 nilai indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 4. Pada tahun 2020, nilai indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional mencapai angka 4. Rata-rata rasio pencapaian indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ialah sebesar 81,25%.

Tabel II-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -				Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Indikator Tujuan/Sasaran														
1	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	Persen (%)	42	41	40	39	29	28,73	28,39	28,01	130,95%	129,92%	129,05%	128,18%
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Persen (%)	52	54	56	58	55	57,60	58,65	58,76	105,77%	106,67%	104,73%	101,31%
3	Skor EKPPD	Indeks	3,10	3,15	3,20	3,25								
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Program														
4	Rasio kesesuaian rencana tata ruang	Persen (%)	58	59	60	61	71	60	71,62	71,99	122,41%	101,69%	119,37%	118,02%
5	Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani	Persen (%)	90	90	90	90	96,35	90	94,63	99,22	107,06%	100 %	105,14%	110,24%
6	Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar	Persen (%)	52	54	56	58	55	55	58,65	58,76	105,77%	101,85%	104,73%	101,31%
7	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	Persen (%)	73,26%	0	0	0	78,20				106,74%	-	-	-
8	Jumlah bidang tanah yang sudah terdata	Bidang/Persil	0	1.127.736	1.133.736	1.318.236		1.492.752			-	132,37%	-	-
9	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	4	4	3	4	4	100 %	75 %	100 %	100%
10	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	4	2	3	4	4	50 %	75 %	100 %	100%

Tabel II-3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DCKTRP Provinsi DKI Jakarta

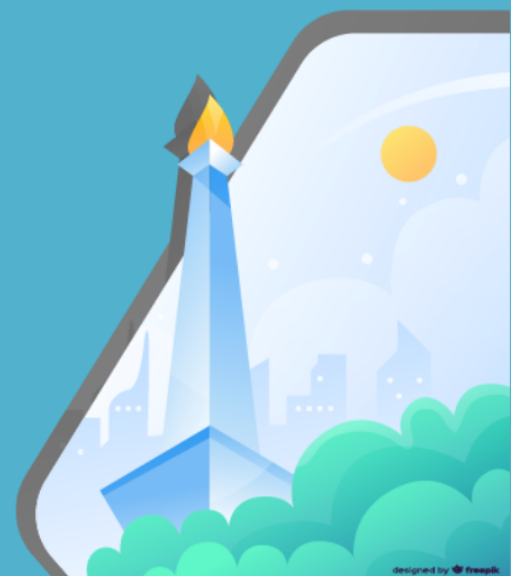
No	Uraian (Urusan/Program)	Anggaran pada Tahun Ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -				Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)
1.	Program Penataan Ruang/Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.730.964.200	20.969.385.963	4.383.611.432	120.972.705.179	3.353.519.000	18.722.015.768	4.323.881.419	115.221.334.745	89,88%	89,28%	98,64%	95,25%	1014,20%	982,05%
2.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda/ Program Penataan Bangunan Gedung	1.679.990.440	352.325.725.003	4.382.419.600	314.193.204.484	1.096.530.160	156.786.757.508	4.381.677.050	283.271.432.462	65,27%	44,50%	99,98%	90,16%	9280,84%	6822,05%
3.	Program Penyiapan Akuisisi Tanah	511.016.088				424.560.000				83,08%					
4.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan		32.104.150.008				27.416.289.860				85,40%				
5.	Program Penatagunaan Tanah				1.427.281.700				560.000.000				39,24%		
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				211.529.296.792				207.972.597.880				98,32%		

BAB III

PERMASALAHAN DAN

ISU-ISU STRATEGIS

DAERAH



III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan memiliki tugas untuk melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

Tabel III-1 Tabel Identifikasi Permasalahan Urusan DCKTRP DKI Jakarta

No.	Permasalahan	Uraian	Keterangan
1	Belum terlaksananya proses inventarisasi, fasilitasi dan penyelesaian administrasi pertanahan secara optimal	<p>Terdapat ± 273.021 bidang tanah yang sudah terdaftar di Jakarta namun belum tersertifikasi. Lokasi tanah-tanah tersebut sebagian besar adalah kawasan permukiman. Bidang-bidang tanah tersebut merupakan bidang tanah yang belum bisa disertifikasi karena kendala sengketa/konflik agraria atau terdapat urusan administrasi objek dan subjek tanah belum terselesaikan. Selain itu, sebagian dari bidang-bidang tanah tersebut (± 900 bidang tanah) akan menjadi prioritas untuk diselesaikan dan berada pada kampung-kampung kota di wilayah DKI Jakarta.</p> <p>Permasalahan agraria di kampung kota dapat merepresentasikan berbagai karakteristik permasalahan legalisasi tanah di Provinsi DKI Jakarta, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanah aset pemerintah yang telah dihuni oleh masyarakat umum; 2. tanah aset pihak swasta yang telah dihuni oleh masyarakat umum; dan 3. kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. <p>Penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan (objek dan subjek tanah) di kampung kota diharapkan dapat menjadi preseden penyelesaian masalah yang serupa pada berbagai di lokasi lain di DKI Jakarta.</p>	Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
2	Masih adanya kasus ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan penataan ruang, serta tingginya kebutuhan ruang sehingga banyak pelanggaran pemanfaatan ruang. 2. Penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang banyak ditangani dengan regulasi penanganan pelanggaran bangunan gedung; 3. Kurangnya kapasitas PPNS Penataan Ruang dalam melakukan tindakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang; 4. Adanya intervensi dalam penindakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang. 5. Keterbatasan sumber daya tenaga ahli penataan ruang 	Bidang Penataan Ruang

No.	Permasalahan	Uraian	Keterangan
3.	Kurangnya data terkini mengenai realisasi Kawasan Berorientasi Transit (KBT)	Permasalahan ini ditambah pula dengan belum tersedianya dokumen pedoman pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT)	Bidang Penataan Ruang
4.	Masih kurangnya pemahaman, kepedulian pengelola bangunan atas penerapan kaidah bangunan gedung hijau pada bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah personel dan pemahaman untuk pemeriksaan atas kaidah bangunan gedung hijau 2. Tidak adanya alat kendali pada Proses Pengawasan dalam tahap pemanfaatan bangunan di DCKTRP. 3. Proses pemeriksaan bangunan gedung tahap pemanfaatan dilakukan pemeriksaan pada tahap perpanjangan SLF, dan saat ini proses tidak melalui rekomendasi dari Dinas Teknis (DCKTRP). 4. Tumpang tindih Pemangku Urusan teknis yang berada di lebih dari satu SKPD sehingga keputusan penanganan berbeda-beda. 	Bidang Bangunan Gedung (Cipta Karya)
5.	Kurangnya kepedulian, dan pengetahuan serta kepatuhan masyarakat untuk penerapan aturan bangunan untuk fasilitas disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah personel dan pemahaman untuk pemeriksaan atas kaidah bangunan gedung ramah disabilitas 2. Tidak adanya alat kendali pada Proses Pengawasan dalam tahap pemanfaatan bangunan di DCKTRP. 3. Proses pemeriksaan bangunan gedung tahap pemanfaatan dilakukan pemeriksaan pada tahap perpanjangan SLF, dan saat ini proses tidak melalui rekomendasi dari Dinas Teknis (DCKTRP). 4. Tumpang tindih Pemangku Urusan teknis yang berada di lebih dari satu SKPD sehingga keputusan penanganan berbeda-beda 	Bidang Bangunan Gedung (Cipta Karya)

3.2. TELAHAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan visi pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai NAWA CITA Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 mencakup:

1. **Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Beberapa agenda pembangunan yang terkait dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan ialah sebagai berikut:

- **Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- **Agenda Pembangunan 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui:
 - Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

- **Agenda Pembangunan 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim**
 Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 - Pembangunan rendah karbon.

Sasaran Makro Pembangunan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD6.010 per kapita pada 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi 2020- 2024 dijaga stabil dengan tren menurun, sebesar $3,0 \pm 1$ persen pada tahun 2020-2022, dan $2,5 \pm 1$ persen pada tahun 2023-2024.

Tabel III-2 Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran Makro	Target 2024
1.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia	6,0%
2.	Tingkat inflasi	1,5 – 3,5%
3.	Tingkat Investasi	7,0%
4.	Share Industri Pengolahan	21,0%
5.	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	7,0% (2020-2024)
6.	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	7,2% (2020-2024)
7.	Defisit Transaksi Berjalan	1,6% PDB
8.	Rasio Pajak	11,7 % PDB (2020-2024)
9.	Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0 %
10.	TPT	3,6 – 4,3 %
11.	Rasio Gini	0,360 – 0,374
12.	IPM	75,54
13.	Penurunan Emisi GRK	37,3 %

Sumber: PerPres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024

3.3. TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 menetapkan konsep RPD Tahun 2023-2026 JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA, yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (right to the city) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 tujuan yaitu sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan
- 2) Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemertaan Kesejahteraan
- 3) Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan
- 4) Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ialah tujuan yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Tujuan pembangunan tahun 2023-2026 kemudian diturunkan menjadi beberapa sasaran dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel III-3 Tujuan dan Sasaran terkait Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023 2026

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
		INDIKATOR	SATUAN		2023	2024	2025	2026	
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6	65	66	67	68	68
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76	69,06	69,56	69,84	70,1	70,1
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	14,76	18,78	20,97	21,87	23,01	23,01
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,43	54,93	55,43	55,93	56,43	56,43
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18,5	19,3	20	20,5	22,3	22,3
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,43	60,12	59,66	59,16	58,72	58,72
2	TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,18	7,69	7,81	7,93	8,04	8,04
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56	5,40 - 6,20	5,40 - 6,20	5,60 - 6,40	5,60 - 6,40	5,60 - 6,40

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
		INDIKATOR	SATUAN		2023	2024	2025	2026	
	Pengalaman dan Nilai Tambah								
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51	8,21	7,91	7,61	7,31	7,31
2.3	Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67	4,13	3,79	3,25	2,91	2,91
		Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,411	0,410	0,410	0,409	0,409
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,37	1,06	0,88	0,83	0,68	0,68
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,962	3,96	3,98	4,01	4,03	4,03
3	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MADANI YANG BERKESETARAAN	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11	81,55	81,77	81,99	82,11	82,11
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,12	12,14	12,16	12,18	12,20	12,20
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,21	73,32	73,42	73,53	73,53
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	16,8	13,7	13,2	12,7	12,2	12,2
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84	95,04	95,14	95,24	95,34	95,34
3.4	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76,07	76,82	77,07	77,32	77,58	77,58
4	TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54	82	83	84	85	85
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	88,5	88,6	88,7	90	90
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Berkembangnya Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47	3,50	3,50	3,57	3,57	3,57
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	80,1 (A)	82 (A)	84 (A)	87 (A)	90,5 (AA)	90,5 (AA)
		Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68,7	70	75	80	85	85
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	TP	TP	TP	TP	TP

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
		INDIKATOR	SATUAN		2023	2024	2025	2026	
	yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel								
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5	326	335,5	335,5	345,5	345,5

Konsep pembangunan Jakarta masa depan adalah menjadi kota yang dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, yaitu dengan mewujudkan Jakarta sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi berskala global dengan prinsip-prinsip : (a) Kota yang tahan pandemi (*pandemic proof city*); (b) Kota yang tangguh menghadapi krisis (*crisis resilient city*); (c) Merencanakan pembangunan Kota Jakarta yang tangguh terhadap dampak pandemi dari sisi ekonomi, sosial, budaya; (c) Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (*digitally advanced city*); dan (d). Kota yang berkelanjutan dan layak huni (*sustainable livable city*). Dalam rangka menuju perwujudan Jakarta ke depan tersebut, strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan yang terkait dengan Tujuan 1 dari RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 ialah sebagai berikut.

Tabel III-4 Strategi Pembangunan terkait Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023 2026

No	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air minum ▪ Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah ▪ Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan ▪ Melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan ▪ Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau ▪ Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga ▪ Meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit ▪ Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan ▪ Meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan ▪ Merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung ▪ Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Arah kebijakan Tahun 2023
Pembangunan pada tahun 2023 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Menuju Pemantapan Kota Global
- 2) Arah kebijakan Tahun 2024
Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar
- 3) Arah kebijakan Tahun 2025
Pembangunan pada tahun 2025 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan Ketahanan Kota melalui Pembangunan yang Merata, Inklusif dan Berkelanjutan
- 4) Arah kebijakan Tahun 2026
Pembangunan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Pemantapan Menuju Kota Global yang Berketahanan, Berkelanjutan dan Inklusif.

3.4. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Perumusan isu strategis bagi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selama lima tahun ke depan juga perlu didasari penelaahan Rencana Strategis dari Kementerian atau Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Keterkaitan ini dapat terjadi karena penerapan prinsip Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atau melalui asas Urusan Bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian dan Lembaga yang di dalam Renstranya memiliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, DKI Jakarta menjadi preseden mengenai pentingnya perencanaan berkaitan dengan tuntutan ketersediaan ruang yang tidak hanya mengacu pada ruang permukaan, tetapi juga hingga hingga pada bagian di atas permukaan berupa struktur layang (*elevated*) dan juga di bawah permukaan (*sub-surface*), dengan adanya pembangunan *Light Rail Transit (LRT)* dan *Mass Rapid Transit (MRT)* yang melibatkan eksplorasi di bawah permukaan tanah dan penggunaan ruang secara layang di atas permukaan tanah.

Adapun terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) program pada rencana strategis dari Kementerian ATR /BPN yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu

Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, yang terdiri dari 8 sasaran program dan 9 indikator kinerja program; serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terdiri dari 2 sasaran program dan 2 indikator Kinerja Program.

3.5. TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Adapun Rencana Strategis DCKTRP ini akan berketertarikan dan berkesinambungan pada tahapan pembangunan ke-5 (lima) dari RPJPD DKI Jakarta, yaitu periode tahun 2023-2025.

Berdasarkan analisis pada penyusunan RPJPD tahap ke-5, proyeksi jumlah penduduk diperkirakan mencapai 11,1 juta sampai dengan 11,8 juta jiwa dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 8 sampai dengan 8,9 persen dan PDRB per kapita Rp 315 juta sampai dengan Rp 380 juta per tahun. Pada periode ini, yang menjadi tema dari pembangunan DKI Jakarta adalah mewujudkan Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan & Berdaya Saing Global. Fokus dan target pembangunan pada tahap ini adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat.

Adapun misi ke-4 dari tahapan pembangunan ke-5 RPJPD DKI Jakarta dinilai berkaitan erat dengan urusan DCKTRP yaitu "Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam". Adapun beberapa hal yang dibahas berkaitan dengan tata ruang, pertanahan, dan bangunan gedung adalah:

1. Perwujudan kawasan TOD modern dengan fasilitas yg mampu mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga kota secara efisien, efektif, dan mantap;
2. Pengembangan kawasan badan air kota yg terpadu dengan penataan ruang Jakarta; serta
3. Pengembangan hunian vertikal yg terintegrasi dgn tata ruang kota.

3.6. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 1 tahun 2012 menjadi sebuah arah pengembangan tata ruang wilayah DKI Jakarta hingga 20 tahun mendatang. Di dalam RTRW 2030 tersebut, terdapat visi pembangunan DKI Jakarta, yaitu:

"Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera"

Untuk terwujudnya Visi tersebut, maka disusunlah Misi yang menjadi arah gerak pencapaian Visi tersebut. Misi yang terdapat di dalam RTRW 2030 adalah sebagai berikut:

Misi:

1. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi;

2. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia;
3. Mengembangkan budaya berkotaan;
4. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana;
5. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; dan
6. Menyeraskan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.

Adapun tujuan, kebijakan, dan strategi pada Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang berkaitan erat dengan arahan RPJPD terdiri dari:

1. **Penciptaan ruang wilayah yg menyediakan kualitas kehidupan kota yg produktif & inovatif**, yang dapat diwujudkan melalui pengembangan pusat kegiatan, salah satunya melalui Kawasan TOD.
2. **Perwujudan kawasan budidaya yg optimal dengan arahan persebaran penduduk di kota/kabupaten administrasi**, terdiri dari:
 - a. Pengembangan kawasan terpadu multifungsi dan mengakomodasi seluruh strata masyarakat dalam 1 kawasan superblock;
 - b. Pengembangan kawasan peremajaan kota menjadi lebih vertikal, kompak, terkait langsung dgn system angkutan umum massal;
 - c. Pengembangan kawasan permukiman dgn akses pada angkutan umum massal.
3. **Perwujudan keterpaduan pemanfaatan & pengendalian di ruang darat, laut, dan udara dgn mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan**, melalui:
 - a. Pengembangan RTH untuk mencapai 30%;
 - b. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerapan konsep bangunan ramah lingkungan (*green building*) dan *sustainable urban design*

3.7. TELAAHAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs*)

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti.

Konsep SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh kesepakatan untuk menjadi tujuan bersama yang universal. Tujuan bersama tersebut merupakan arah untuk memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam menjaga tiga dimensi tersebut SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berupa SGDs. Tujuan global dari SDGs sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan

4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan Gender
6. Akses air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur, industri dan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Menjaga ekosistem laut
15. Menjaga Ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta ialah :

- Tujuan 9 : Infrastruktur, industri dan inovasi
- Tujuan 11 : Kota dan komunitas yang berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana-rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan , pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

3.8. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, dirumuskan dengan mempertimbangkan:

1. Hasil Identifikasi Permasalahan
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Telaah Renstra Kementerian ATR/BPN
4. Telaahan Rencana Jangka Panjang Daerah

Isu strategis Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal untuk mendukung Kota Berorientasi Transit
2. Penerapan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas pada bangunan gedung milik pemerintah dan non pemerintah
3. Penyelesaian administrasi pertanahan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta ialah sebagai berikut.

Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023 2026

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
		INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	% Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Persentase	10%	10%	20%	40%
1.1	Penyelesaian Administrasi Pertanahan Untuk Kampung Kota	% Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan Administrasinya	Persentase	5%	10%	25%	35%
2	Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan RDTR	Persentase	74%	75%	76%	77%
2.1	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase	85%	86%	87%	88%
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Berorientasi Lingkungan	% Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Bangunan Gedung	Persentase	2,5%	5%	7,5%	10%
3.1	Pemenuhan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Dan Ramah Disabilitas	% Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau	Persentase	7,50%	8,50%	9,50%	10,50%
		% Bangunan gedung yang Ramah Disabilitas	Persentase	7,50%	8,50%	9,50%	10,50%

BAB V

STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN



V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkahlangkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dilakukan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus, konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel V-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD DKI Jakarta : Regenerasi Kota Yang Berketahanan dan Berkelanjutan			
Sasaran RPD DKI Jakarta : Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Sasaran 1.1 : Penyelesaian Administrasi Pertanahan Untuk Kampung Kota	Strategi 1.1.1 : Optimalisasi koordinasi ke instansi vertikal (BPN) & stakeholder terkait lainnya	Arah Kebijakan 1.1.1.1 : Pelibatan seluruh unsur instansi Pemda DKI Jakarta yang terkait dalam proses koordinasi dengan instansi vertikal (BPN) & stakeholder terkait
		Strategi 1.1.2 : Optimalisasi proses penyelesaian administrasi pertanahan	Arah Kebijakan 1.1.2.1 : Pengembangan kebijakan & regulasi pertanahan yang adaptif
			Arah Kebijakan 1.1.2.1 : Pembangunan database pertanahan yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan Kanwil BPN DKI Jakarta
			Arah Kebijakan 1.1.2.1 : Inventarisasi data pertanahan dan permasalahan pertanahan di kampung kota

Sasaran RPD DKI Jakarta : Perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Tujuan 2 : Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	1. Sasaran 2.1 : Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Strategi 2.1.1 : Peningkatan kualitas rencana tata ruang dan turunannya untuk pengembangan Kawasan Berorientasi Transit	Arah Kebijakan 1.1.1.1 : Penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang untuk pengembangan Kawasan TOD
			Arah Kebijakan 1.1.1.2 : Peningkatan koordinasi dan sosialisasi terkait regulasi tata ruang
		Strategi 2.1.2 : Peningkatan pengawasan dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang	Arah Kebijakan 2.1.2.1 : Peningkatan koordinasi pengawasan dan penegakan hukum untuk pelanggaran pemanfaatan ruang
			Arah Kebijakan 2.1.2.12: Penyiapan dasar hukum pelanggaran pemanfaatan ruang
		Strategi 2.1.3 : Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang	Arah Kebijakan 2.1.3.1 : Pengembangan integrasi sistem informasi pemanfaatan ruang
			Arah Kebijakan 2.1.3.2: Pemutakhiran data & informasi digital terkait penataan ruang dan pertahanan
Sasaran RPD DKI Jakarta : Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Tujuan 3 : Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Berorientasi Lingkungan	3. Sasaran 3.1 : Pemenuhan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Dan Ramah Disabilitas	1. Strategi 3.1.1 Meningkatkan penerapan kebijakan bangunan gedung hijau di bangunan gedung Pemda dan Non Pemda	1. Arah Kebijakan 3.1.1.1 Pengembangan regulasi dan pedoman penerapan dan pengawasan kaidah bangunan gedung hijau
			2. Arah Kebijakan 3.1.1.2 Peningkatan kapasitas & koordinasi dengan pengelola pemilik/pelaksana/ pengelola bangunan gedung untuk penerapan BGH (Pemda dan Non Pemda)
			3. Arah Kebijakan 3.1.1.3 Peningkatan pemantauan penerapan kaidah bangunan gedung hijau

		Strategi 3.1.2 Meningkatkan penerapan kaidah bangunan ramah disabilitas di bangunan gedung Pemda dan Non Pemda	<p>1. Arah Kebijakan 3.1.2.1 Pengembangan regulasi dan pedoman penerapan dan pengawasan kaidah bangunan ramah disabilitas</p> <p>2. Arah Kebijakan 3.1.2.2 Peningkatan kapasitas & koordinasi dengan pengelola pemilik/pelaksana/ pengelola bangunan gedung untuk penerapan bangunan ramah disabilitas (Pemda dan Non Pemda)</p> <p>3. Arah Kebijakan 3.1.2.3 Peningkatan pemantauan penerapan kaidah bangunan ramah disabilitas</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN



VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan urusan penataan ruang, pertanahan, dan bangunan Gedung. Berikut adalah rencana program dan kegiatan tahun 2023-2026:

1. **Program Penatagunaan Tanah**, dengan indikator program yaitu :

Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman

Terdiri dari kegiatan,

- 1) Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan indikator kegiatan :
Jumlah bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman

2. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**, dengan indikator program yaitu :

Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit

dan

Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu

Terdiri dari kegiatan,

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, dengan indikator kegiatan :
Persentase dokumen rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan indikator kegiatan :
Persentase penambahan/pemutakhiran data di dalam sistem informasi penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan indikator kegiatan :
Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator program yaitu :

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari kegiatan,

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kegiatan : Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan : Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahh, dengan indikator kegiatan : Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Program Penataan Bangunan, dengan indikator program yaitu :

Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan

Terdiri dari kegiatan,

- 1) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, dengan indikator kegiatan :
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi,

dan

Persentase penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi

- 2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan indikator kegiatan :

Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel VI-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1.1	TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS															
1.	PENINGKATAN SERTIFIKASI BIDANG TANAH DI KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SERTIFIKASI BIDANG TANAH	Persen	0	10	3.200.000.000	10	3.200.000.000	20	3.200.000.000	40	3.200.000.000	80	12.800.000.000		
1.1	PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN UNTUK KAMPUNG KOTA	PERSENTASE BIDANG TANAH KAMPUNG KOTA YANG TERSELESAIKAN ADMINISTRASINYA	Persen	0	5	3.200.000.000	10	3.200.000.000	25	3.200.000.000	35	3.200.000.000	75	12.800.000.000		
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	Persentase	0	10%	3.200.000.000	20%	3.200.000.000	20%	3.200.000.000	50%	3.200.000.000	100%	12.800.000.000	Bidang Pertanahan dan Pemetaan	DKI Jakarta
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	Bidang Tanah	0	700	3.200.000.000	1400	3.200.000.000	1400	3.200.000.000	3500	3.200.000.000	7000	12.800.000.000	Bidang Pertanahan dan Pemetaan	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	0	1	3.200.000.000	1	3.200.000.000	1	3.200.000.000	1	3.200.000.000	4	12.800.000.000	Bidang Pertanahan dan Pemetaan	DKI Jakarta
1.2	TERCAPAINYA PERBAIKAN POLA AKTIVITAS DAN MOBILITAS MELALUI PENGEMBANGAN KOTA BERORIENTASI TRANSIT															
1.	PENATAAN RUANG YANG BERKEADILAN UNTUK Mendukung Kota Berorientasi Transit	PERSENTASE KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG	Persentase	73	74	372.334.034.220	75	312.730.605.122	76	352.509.790.233	77	334.591.597.831	77	1.372.166.027.406		
1.1	PENINGKATAN KUALITAS RENCANA DAN PERWUJUDAN Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	PERSENTASE KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI SISTEM PUSAT PELAYANAN BERORIENTASI TRANSIT	Persentase	84	85	372.334.034.220	86	312.730.605.122	87	352.509.790.233	88	334.591.597.831	88	1.372.166.027.406		
1.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	4	254.489.973.204	4	236.930.814.435	4	270.485.945.541	4	241.220.964.471	4	1.003.127.697.651	Sekretariat Pusat Data dan Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase	0	100	-	100	200.000.000	100	-	100	-	100	200.000.000	Sekretariat	DKI Jakarta
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	Sekretariat	DKI Jakarta
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	0	4	200.018.000.000	4	200.018.000.000	4	200.018.000.000	4	200.018.000.000	4	800.072.000.000	Sekretariat Pusat Data dan Informasi Tata	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	513	513	200.000.000.000	513	200.000.000.000	513	200.000.000.000	513	200.000.000.000	513	800.000.000.000	Sekretariat	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	8	18.000.000	8	18.000.000	8	18.000.000	8	18.000.000	8	72.000.000	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	DKI JAKARTA A

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	0	4	33.843.420.602	4	15.527.967.494	4	48.727.869.018	4	18.886.392.056	4	116.985.649.170	Sekretaria Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	DKI JAKARTA A

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	1.266.006.819	1	1.329.307.160	1	1.395.772.518	1	1.465.561.144	1	5.456.647.641	Sekretariat	DKI JAKARTA
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		17	29.576.271.819	17	11.159.284.875	17	44.265.370.937	17	14.328.462.670	17	99.329.390.301	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	8	107.590.840	8	109.501.100	8	109.693.565	8	109.895.653	8	436.681.158	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI JAKARTA A

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	8	2.015.483.104	8	2.041.276.549	8	2.064.631.140	8	2.086.078.532	8	8.207.469.325	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI JAKARTA A

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	6	387.704.660	6	390.593.410	6	393.626.598	6	396.811.444	6	1.568.736.112	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	240.000.000	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI JAKARTA A

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	8	430.363.360	8	438.004.400	8	438.774.260	8	439.582.613	8	1.746.724.633	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI JAKARTA A

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	0	4	100.098.010	4	105.102.911	4	110.358.056	4	115.875.959	4	431.434.936	Sekretariat	DKI JAKARTA
1.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	3	100.098.010	3	105.102.911	3	110.358.056	3	115.875.959	3	431.434.936	Sekretariat	DKI JAKARTA
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	14.676.881.533	4	15.014.567.431	4	15.369.137.624	4	15.769.190.977	4	60.829.777.565	Sekretariat Pusat Data dan Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	1	6.994.366.575	1	6.994.366.575	1	6.994.366.575	1	6.994.366.575	1	27.977.466.300	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan	DKI JAKARTA
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	8	966.273.000	8	969.210.000	8	972.293.850	8	1.003.286.543	8	3.911.063.393	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	2	6.716.241.958	2	7.050.990.856	2	7.402.477.199	2	7.771.537.859	2	28.941.247.872	Sekretariat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	4	5.851.573.059	4	6.065.176.599	4	6.260.580.843	4	6.431.505.479	4	24.608.835.980	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya,	DKI JAKART A

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	144	727.900.491	144	802.370.777	144	861.218.711	144	926.422.436	144	3.317.912.415	Sekretariat Pusat Data dan informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan	DKI JAKART A

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
	Dinas Operasional atau Lapangan														Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	120	969.635.208	120	999.317.632	120	1.005.702.704	120	1.038.829.193	120	4.013.484.737	Sekretariat Pusat Data dan Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	DKI JAKARTA

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	4	3.307.458.374	4	3.332.251.305	4	3.462.422.543	4	3.488.455.121	4	13.590.587.343	Sekretariat	DKI Jakarta
1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	0	7 unit	846.578.986	7 unit	931.236.885	7 unit	931.236.885	7 unit	977.798.729	7 unit	3.686.851.485	Sekretariat	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	Persentase	0	90	117.844.061.016	90	75.799.790.687	90	82.023.844.692	90	93.370.633.360	90	369.038.329.755	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang Bidang Pertanahan dan Pemetaan Pusat Data dan Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	DKI Jakarta
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persentase	90	90		90		90		90		90		Bidang Pengawasan Bangunan Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan	

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP						
																	Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase dokumen rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	0	100	7.390.400.000	100	9.523.600.000	100	9.754.600.000	100	10.408.700.000	100	37.077.300.000	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang Bidang Pertanahan dan Pemetaan Pusat Data dan Informasi Tata	DKI Jakarta		

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Ruang dan Pertanahan Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya,Tata Ruangan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.12.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Dokumen	0	4	2.400.000.000	5	3.910.000.000	5	4.141.000.000	5	4.795.100.000	19	15.246.100.000	Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang	DKI Jakarta
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pegub selain RTRW Provinsi	Dokumen	0	6	4.390.400.000	6	5.013.600.000	6	5.013.600.000	6	5.013.600.000	24	19.431.200.000	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya,	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Bidang Pertanahan dan Pemetaan Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	4	2.400.000.000	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota	DKI Jakarta
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penambahan/pe mutakhiran data di dalam sistem informasi penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Persentase	0	25	109.805.474.407	25	65.629.006.078	25	71.622.060.083	25	82.314.748.751	25	329.371.289.319	Bidang Pertanahan dan Pemetaan Pusat Data dan Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Perencanaan dan	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Pemanfaatan Ruang Kota Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang Bidang Pengawasan Bangunan Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Bidang Gedung Pemerintah Daerah Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya,	

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	100	8	109.805.474.407	9	65.629.006.078	10	71.622.060.083	11	82.314.748.751	38	329.371.289.319	Bidang Pertanahan dan Pemetaan Pusat Data dan Informasi Tata Ruang dan Pertanahan	DKI Jakarta
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase	0	100	648.186.609	100	647.184.609	100	647.184.609	100	647.184.609	100	2.589.740.436	Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Bidang Pengawasan Bangunan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
															Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen		12 Dokumen	648.186.609	12 Dokumen	647.184.609	12 Dokumen	647.184.609	12 Dokumen	647.184.609	48 Dokumen	2.589.740.436	Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Bidang Pengawasan Bangunan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.3	TERCAPAINYA PEMULIHAN EKOSISTEM KOTA DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON															
1.	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG YANG BERORIENTASI LINGKUNGAN	PERSENTASE PENURUNAN INDEKS KONSUMSI ENERGI (IKE) BANGUNAN GEDUNG	Persentase	0	2,5	473.686.000.000	5	824.766.000.000	7,5	1.526.106.000.000	10	1.576.176.000.000	10	4.400.734.000.000		
1.1	PEMEMUHAN BANGUNAN GEDUNG YANG MEMENUHI	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG MEMENUHI	Persentase	3	7,5	473.686.000.000	8,5	824.766.000.000	9,5	1.526.106.000.000	10,5	1.576.176.000.000	10,5	4.400.734.000.000		

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
	KAJIDAH BANGUNAN GEDUNG HIJAU DAN RAMAH DISABILITAS	KAJIDAH BANGUNAN GEDUNG HIJAU														
		PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG RAMAH DISABILITAS	Persentase	5	7,5		8,5		9,5		10,5		10,5			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	Persentase	0	96	473.686.000.000	97	824.766.000.000	98	1.526.106.000.000	99	1.576.176.000.000	99	4.400.734.000.000	Bidang Gedung Pemerintah Daerah Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Persentas	0	100	448.686.000.000	100	799.766.000.000	100	1.501.106.000.000	100	1.551.176.000.000	100	4.300.734.000.000	Bidang Gedung Pemerintah Daerah Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya,	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	0	5		5		5		5		200		Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	DKI Jakarta
															Bidang Gedung Pemerintah Daerah	
															Bidang Pengawasan Bangunan	
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	
															Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
															Suku Dinas Cipta Karya,	

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	0	7	382.336.000.000	7	732.076.000.000	7	1.432.076.000.000	7	1.482.056.000.000	28	4.028.544.000.000	Bidang Gedung Pemerintah Daerah Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	0	4	63.400.000.000	4	64.450.000.000	4	65.500.000.000	4	65.550.000.000	16	258.900.000.000	Administrasi Jakarta Timur Bidang Gedung Pemerintah Daerah Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	0	70	2.400.000.000	70	2.520.000.000	70	2.640.000.000	70	2.760.000.000	280	10.320.000.000	Bidang Gedung Pemerintah Daerah Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	DKI Jakarta
1.03.08.1.01.09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar	Bangunan	0	0	-	26	260.000.000	28	260.000.000	28	280.000.000	80	800.000.000	Bidang Gedung	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
	Bangunan Gedung Negara	Huruf Daftar Nomor (HDNo)													Pemerintah Daerah	
1.03.08.6.01.08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	0	120	550.000.000	120	460.000.000	120	630.000.000	120	530.000.000	480	2.170.000.000	Bidang Pengawasan Bandungan	DKI Jakarta
1.03.08.2.01	Penyelenggaraa b Bangunann Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota . Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelesaian proses penyelenggaraan perizinan Penerbitan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persentase	0	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000	100	25.000.000.000	100	100.000.000.000	Bidang Pengawasan Bangunan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya,	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	0	6000	25.000.000.000	6000	25.000.000.000	6000	25.000.000.000	6000	25.000.000.000	24.000	100.000.000.000	Bidang Pengawasan Bangunan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota	DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS 2023-2026
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

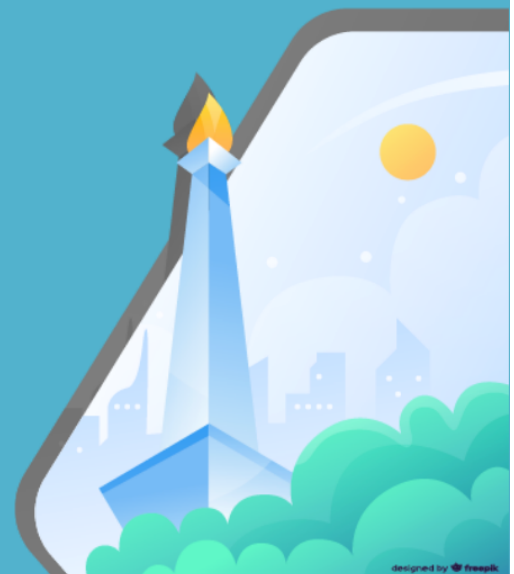
KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGET	RP				
															Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	

BAB VII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN



VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Berikut adalah indikator sasaran dalam RPD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel VII-1 Indikator Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026 Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran RPD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
	Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	
1	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76 (2021)	69,06	69,56	69,84	70,1	70,1
2	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	14,76(2021)	18,78	20,97	21,87	23,01	23,01
3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18,5 (2022)	19,3	20	20,5	22,3	22,3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ialah sebagai berikut.

Tabel VII-2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah 2023-2026 Yang Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		Anggaran pada Tahun Ke -				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026	
1	% bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	Persentase	10%	20%	20%	50%	100%
2	% kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	Persentase	90%	90%	90%	90%	90%
3	% pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persentase	90%	90%	90%	90%	90%
4	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	Persentase	96%	97%	98%	99%	99%

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang akan diukur setiap tahun sebagai tolak ukur keberhasilan dan evaluasi pelayanan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam periode jangka menengah selanjutnya.

BAB VIII

PENUTUP



VIII. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023 2026 ini disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023 2026 ini telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah selaras dengan RPD DKI Jakarta 2023-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, maka akan dipergunakan sebagai

- Pedoman bagi seluruh unit kerja HDinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis
- Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD
- Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.